

ABSTRAK

Miftah Herdin Alfanza *“Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dalam Rangka Penanganan Fakir Miskin Di Kecamatan Banjaran Tinjauan Siyasah Dusturiyah”*.

Masalah fakir miskin merupakan masalah sosial yang terjadi di Kabupaten Bandung, dan merupakan masalah serius dikarenakan akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung. Jumlah fakir miskin, pada tahun 2019 terdapat 2.950 orang, namun bertambah pada data terbaru yaitu 2021 sebanyak 3.469 orang. Maka, pemerintah daerah membuat regulasi tentang penanganan fakir miskin dalam pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tahapan dan realisasi pemenuhan hak kesejahteraan sosial terhadap fakir miskin berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, (2) untuk mengetahui kebijakan yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial terhadap fakir miskin tersebut, (3) untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap tahapan dan realisasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam rangka penanganan fakir miskin.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dengan model dari Edward III, teori negara kesejahteraan, dan teori siyasah dusturiyah dengan asas prinsip didalamnya meliputi asas pemerintahan yang baik, asas persamaan dan asas tanggungjawab negara.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian deskriptif, metode analisis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yaitu pendekatan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan studi empiris kepada masyarakat, sumber data dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Hasil Penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah (1) terdapat berbagai upaya yang dilakukan dalam menangani fakir miskin antara lain, program unggulan yang dilaksanakan adalah KUBE yang berfokus kepada pengembangan fakir miskin dan bantuan stimulus secara instan. (2) Dalam mengatasi kendala yang ada, Dinas Sosial melakukan langkah langkah ini yaitu optimalisasi personil, verifikasi dan validasi ulang oleh tenaga sosial, penerbitan perda tentang SLRT, dan bekerja sama dengan pihak lain. (3) Dalam tinjauan siyasah dusturiyah, implementasinya sudah sesuai dengan asas yang ada, yaitu asas pemerintahan yang baik, persamaan dan tanggungjawab negara, namun belum sempurna, sesuai dengan kondisi ideal.

Kata Kunci: Penanganan Fakir Miskin, Perda, Siyasah Dusturiyah